



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SUBAIDAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 820897

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/60 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/60 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HADIAH Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/55 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN , HADIAH , Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 3095 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **262.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 A/T / MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	58.488.793
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.530.488.793
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.505.488.793

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.